

## DAMPAK KEBIJAKAN TRANSHIPMENT OLEH INDONESIA PADA INDSUTRI PRODUK OLAHAN IKAN THAILAND

DJOESEPT HARMAT TARIGAN, PRADONO BUDI SAPUTRO

Universitas Satya Negara Indonesia  
igancester@gmail.com, pradono.bs@gmail.com

**Abstract:** *The problem of transshipment is a matter of transitional transport or modified transportation issues. This transit place can receive supplies and can deliver goods. The main purpose of the transshipment problem is to minimize the cost of the distribution of goods delivered from the place of origin to the destination even though through the transit point. The problem in this research is with the policy of transshipment issued by Indonesian government causing negative impact to fishery industry, especially processed fishery product in Thailand country. The eradication of fish theft in Indonesian waters had a direct impact on Thailand's fishery exports which affected the country's gross domestic product (GDP). Thailand National Economic and Social Development Board (NESDB) data reveal that the contribution of the fishery sector to Thailand's GDP has decreased drastically. The average contribution of the fishery sector to Thailand's GDP has been recorded at 1.6 percent, while in the third quarter of 2015 it contributed minus 3.1 percent. While the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) noted in 2013 to second quarter 2014, Thai fishery industry has decreased.*

**Keywords:** *Transshipment Policy, Export, Fishing Industry*

**Abstrak:** Masalah transshipment merupakan persoalan transportasi transisi atau persoalan transportasi yang termodifikasi. Tempat transit ini dapat menerima pasokan dan dapat mengirimkan barang. Tujuan utama masalah transshipment adalah meminimumkan biaya distribusi barang yang dikirim dari tempat asal ke tempat tujuan meskipun melalui tempat transit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan adanya kebijakan transshipment yang dikeluarkan pemerintah Indonesia menimbulkan dampak negatif terhadap industri perikanan terutama produk olahan perikanan di Negara Thailand. Pemberantasan pencurian ikan di perairan Indonesia berdampak langsung pada anjloknya ekspor perikanan Thailand yang berimbas kepada produk domestik bruto (PDB) negara tersebut. Data National Economic and Social Development Board (NESDB) Thailand mengungkapkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Thailand mengalami penurunan drastis. Kontribusi rata-rata sektor perikanan terhadap GDP Thailand selama ini tercatat sebesar 1,6 persen, sedangkan di kuartal III 2015 kontribusinya minus 3,1 persen. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat pada 2013 sampai kuartal II 2014, industri perikanan Thailand mengalami penurunan.

**Kata kunci:** Kebijakan transshipment, ekspor, industri perikanan .

### A.Pendahuluan

Penelitian ini akan menjelaskan dampak kebijakan transshipment oleh Indonesia pada industri produk olahan ikan Thailand. Dimana hal yang menarik yang membuat peneliti melakukan penelitian ini yaitu kebijakan transshipment yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dapat berpengaruh negatif pada sektor industri Thailand yang berkaitan dengan industri produk olahan ikan. Pemberantasan pencurian ikan di perairan Indonesia berdampak langsung pada anjloknya ekspor perikanan Thailand yang berimbas kepada produk domestik bruto (PDB) negara tersebut. Data National Economic and Social Development Board (NESDB) Thailand mengungkapkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Thailand mengalami penurunan drastis. Kontribusi rata-rata sektor perikanan terhadap GDP Thailand selama ini tercatat sebesar 1,6 persen, sedangkan di kuartal III 2015 kontribusinya minus 3,1 persen. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat pada 2013 sampai kuartal II 2014, industri perikanan Thailand mengalami penurunan. Kemudian mulai membaik dari pertengahan kuartal III sampai pertengahan kuartal IV. Namun sejak itu, industri perikanan Thailand terus menurun hingga saat ini. Salah satu penyebab utamanya adalah

kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mulai memberantas kapal penangkap ikan ilegal dan moratorium bekas kapal asing di kuartal IV 2014.

Susi Pudjiastuti selalu menunjukkan sikap tegas lantaran industri pengolahan ikan di Asia Tenggara dikuasai oleh Thailand dan Filipina. Sementara Indonesia sebagai pemilik lautan terluas dan garis pantai terpanjang di Asia Tenggara hanya menduduki posisi ketiga. "Ini sangat memalukan. Sebaiknya kita semua benar-benar serius untuk menata ini kembali supaya bisa menjadi nomor satu di ASEAN," kata Menteri Kelautan dan Perikanan itu. Geramnya Menteri Susi juga didasari atas tingginya ekspor ikan Thailand dan Filipina akibat bebasnya mereka memancing di perairan Indonesia.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pencurian ikan (illegal fishing) pada masa lalu membuat nelayan dan perusahaan penangkapan ikan Thailand dan Filipina bebas menangkap ikan di Indonesia dan kemudian membawanya ke negara mereka untuk diolah dan diekspor. "Tragisnya ikan yang mereka ambil ada juga yang diekspor ke Indonesia. Jadi, kita membeli ikan yang mereka ambil dari kita," kata Susi dalam Kompas.com. Menteri Susi pun ingin merebut gelar negara pengekspor ikan terbanyak di ASEAN itu dengan menerapkan sejumlah kebijakan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan transshipment yang tujuannya adalah untuk membatasi ruang pencurian yang selama ini terbuka lebar. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan yaitu mendeskripsikan alasan dikeluarkannya kebijakan transshipment oleh pemerintah Indonesia dan menjelaskan bagaimana dampak kebijakan transshipment oleh Indonesia pada sektor industri Thailand yang berkaitan dengan industri produk olahan ikan Thailand.

## **B. Metodologi Penelitian**

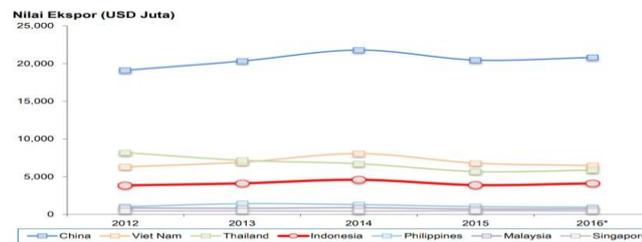
Metode dalam penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian library research, yaitu dengan menyusun dan menginterpretasikan data yang ada, lalu menjelaskannya serta berusaha memaparkan kondisi yang sedang diteliti dengan menggambarkan dan menelaahnya secara lebih jelas lagi kondisi tersebut. Faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi, kondisi, dan fenomenanya. Dalam penelitian pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber maupun cara. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data contohnya melalui orang lain atau dokumen. Dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dengan menggunakan alat indra untuk mengetahui data yang terdapat dalam objek penelitian (Arikunto, 2002:204). Observasi akan dilakukan apabila dalam pelaksanaan penelitian diperlukan untuk klarifikasi data yang telah diperoleh. Sementara itu, dokumentasi memiliki arti barang-barang yang tertulis. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan penyelidikan terhadap terhadap benda-benda tertulis seperti buku, catatan, notulen, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data-data terkait kinerja keuangan, klarifikasi lapangan, dan pengambilan gambar-gambar yang dianggap perlu dalam penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Negara eksportir produk perikanan lainnya di kawasan ASEAN selain Indonesia dan Vietnam adalah Thailand. Secara peta perdagangan dunia, Thailand saat ini (2016) berada pada posisi 16 dari keseluruhan eksportir perikanan (HS03) dunia. Secara nilai, ekspor produk perikanan pada periode tahun 2007-2011 mengalami trend peningkatan rata-rata USD 156.836,- per tahun. Namun sejak tahun 2012-2016 kinerja ekspor produk perikanan Thailand cenderung mengalami penurunan rata-rata sebesar USD 205.976,- per tahun. Kondisi ini berdampak pada perhitungan indeks RCA yang terus mengalami kecenderungan menurun sejak tahun 2007 hingga 2016. Pada tahun 2007 indeks RCA produk perikanan Thailand sebesar 3,23 menjadi 1,36 pada tahun 2016.

Melihat pada hasil perhitungan nilai indeks RCA pada ketiga negara tersebut, Hal ini juga didukung dengan data dari UN COMTRADE dimana tingkat ekspor perikanan Thailand terus mengalami penurunan.

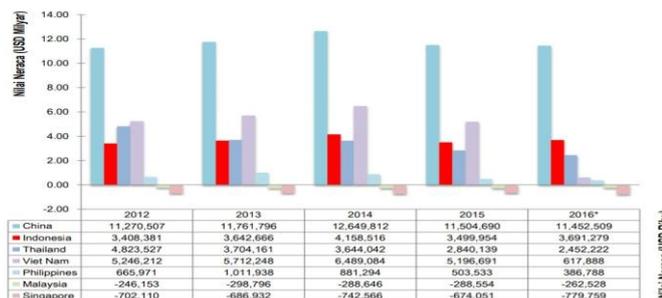
Nilai Ekspor Perikanan Thailand Dibandingkan Dengan Negara Pesaingnya Periode 2012-2016



Sumber: ITC Calculation Based on UN COMTRADE

Pada periode tahun 2012-2016, trend nilai ekspor perikanan Thailand terus mengalami penurunan dan berbanding terbalik dengan Indonesia yaitu negara yang menjadi wilayah penangkapan ikan kapal-kapal dari Thailand. Menurut Data diatas bahwa nilai ekspor perikanan Indonesia naik 2,31% per tahun, China naik 2,29% per tahun, Vietnam naik 1,45% per tahun, Philipina naik 0,32% per tahun sebaliknya Singapura turun 0,66% per tahun, Malaysia turun 3,62% per tahun dan Thailand turun 7,73% per tahun. Penurunan nilai ekspor juga sejalan dengan penurunan neraca perdagangan di Thailand. Hal ini menunjukkan sektor perikanan memberikan sumbangan besar dalam neraca perdagangan di Thailand.

Perbandingan Neraca Perdagangan di Thailand Dengan Negara Pesaingnya Tahun 2012-2016



Sumber: ITC Calculation Based on UN COMTRADE

Sejak awal menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah banyak mengeluarkan kebijakan. Salah satu kebijakan yang dianggap efektif yaitu pelarangan *transshipment* atau bongkar muat ikan di tengah laut terbukti membuat negara-negara konsumen ikan khususnya tuna kekurangan pasokan. Contohnya saja salah satu kota di Filipina General Santos. Siapa sangka kota General Santos merupakan salah satu eksportir tuna fresh terbesar di dunia. Padahal menurut Susi tuna *fresh* di dapat dari Perairan Bitung, Sulawesi Utara. Susi juga mengungkapkan modus Filipina bisa mendapatkan ikan tuna fresh dari Bitung Sulawesi Utara. Ikan-ikan tuna itu diangkut oleh nelayan Bitung dan dikirim ke kapal pengangkut atau tramper Filipina yang sudah menunggu di garis perbatasan. Dari kegiatan itu setidaknya General Santos mampu mengekspor tuna segar cukup besar setiap tahunnya yaitu hingga US\$ 2 miliar. Sementara sang pemasok yaitu Bitung hanya mampu mengekspor produk tuna kaleng per tahun sebesar Rp 16 miliar.

Berkurangnya stok ikan kaleng asal Thailand dan Filipina membuka peluang bagi para pelaku usaha ikan kaleng Indonesia. Akibat kejadian ini Fury mengatakan harga ikan kaleng Indonesia di Dubai kini bisa bersaing dengan produk Thailand dan Filipina. Saat ini menurut Fury harga rata-rata ikan kaleng Thailand dan Filipina di Dubai US\$ 17/karton. Sedangkan ikan kaleng Indonesia kini sudah mulai merangkak naik menjadi US\$ 16,5-16,75/karton. Sampai pada tahun 2014 industri pengolahan ikan di Asia Tenggara dikuasai oleh Thailand dan Filipina. Ekspor ikan olahan dan ikan mentah dari kedua negara tersebut lebih besar dibandingkan negara di Asia Tenggara lainnya. Sementara itu, Indonesia sebagai pemilik

lautan terluas dan garis panjang pantai terpanjang di Asia Tenggara hanya menduduki posisi ketiga. Namun, kini situasinya mulai berubah dan menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahwa kekuatan industri perikanan di wilayah Asia Tenggara mulai bergeser ke Indonesia.

Merosotnya produksi perikanan di Thailand berkorelasi positif dengan implementasi kebijakan luar biasa Pemerintahan Jokowi-JK terkait sektor kelautan dan perikanan. Produksi mereka berkurang dan tentunya berdampak kepada meningkatnya pengangguran dari sektor industri perikanan serta terbongkarnya praktik perbudakan yang melibatkan perusahaan perikanan mereka. Hal yang sangat mengejutkan terjadi di OOC (Our Ocean Conference) 2018 di Nusa Dua Bali, tanggal 29-30 Oktober 2018 yaitu adanya pernyataan minta maaf yang disampaikan oleh H.E.Luck Wajananawat selaku Deputy Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand. Wajar jika Wajananawat menyatakan bahwa Pemerintah Thailand mulai menyadari adanya salah kaprah paham 'open access' di bidang perikanan. Dimana Pemerintah Thailand menyadari kurangnya hukum yang efektif dan relevan dengan kebutuhan dunia, tidak adanya pengelolaan kapal serta keterbatasan upaya pengendalian, monitoring dan penindakan di tempat dan adanya produk-produk ilegal termasuk tenaga kerja.

Karenanya, sejak tahun 2015, tambah Wajananawat, Pemerintah Thailand fokus pada pembatasan akses di bidang perikanan, menyiapkan aturan perikanan baru, menegakkan hukum, hingga memastikan ketertelusuran produk-produk perikanan serta mendorong kerjasama internasional. Apa yang disampaikannya tersebut senada dengan Hamed Said, Al-Oufi, Ph. D yang mewakili Pemerintah Oman. Hamed menyatakan bahwa ada beberapa isu yang perlu menjadi perhatian dunia yaitu keamanan di laut, perbaikan kondisi pesisir dan laut, penanganan stok ikan hingga bagaimana membangun keterpaduan melawan IUUF. Pernyataan menyentuh sanubari datang dari Archbishop Peorro Pioppo, *Ambassador of The Holy See* yang menegaskan perlunya perlindungan komunitas nelayan, melindungi hak-hak dan harga diri mereka.

Pemberantasan pencurian ikan (*illegal fishing*) di Perairan Indonesia bukan hanya membawa dampak pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan Indonesia semata. Namun memukul angka Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan Thailand dan negara lain. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan, data dari National Economic and Social Dev Board (NESDB) Thailand mengungkapkan bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Thailand mengalami penurunan drastis. Kontribusi rata-rata sektor perikanan terhadap PDB Thailand sekitar 1,6%, sedangkan pada kuartal III-2015 kontribusinya justru minus 3,1%. Dengan adanya kebijakan Transshipment yang menjadi upaya untuk memberantas illegal fishing membuat banyak negara yang mulai kesulitan mendapatkan stock ikan untuk industri pengolahan perikanan. Selain negara Jepang yang merelokasi industri produk olahan ikannya dari Thailand ke Indonesia, kini industri produk olahan ikan Thailand juga mulai melirik Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan banyak industri perikanan yang ingin merelokasi industri pengolahannya termasuk Thailand. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan parlemen Thailand pada pertemuan bilateral parlemen Thailand dengan DPR RI di Bangkok, bahwa Thailand memiliki minat untuk meningkatkan investasi di bisnis perikanan di Indonesia. Didukung dengan adanya jaminan penangkapan ikan tidak dilakukan secara ilegal sesuai dengan revisi UU Thailand. Minat Thailand ini dinilai selaras dengan keinginan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dan kelautan di Indonesia agar dapat menyentuh angka 12%.

Salah satu perusahaan Thailand yang ingin beroperasi di Indonesia yaitu Perusahaan Aneka Tuna di Thailand. Perusahaan ini ingin merelokasi bisnisnya ke Indonesia dikarenakan sulitnya pasokan ikan yang dibutuhkan untuk produksi pengolahan ikan. Disisi lain pemerintah juga memberikan kebebasan masuknya industri pengolahan ikan ke dalam negeri dengan konsekuensi dilarang melakukan penangkapan di dalam negeri karena ikan yang diolah adalah ikan yang berasal dari nelayan dalam negeri. Selain Perusahaan Aneka Tuna ada juga perusahaan IGO Company Limited Thailand yang ingin beroperasi di Indonesia terutama di wilayah kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh. Dalam beroperasi perusahaan IGO Company

Limited Thailand bekerjasama dengan Pemkab Aceh Utara. Kehadiran investor asal Thailand tersebut, ditandai dengan kunjungan tim investor IGO Company Limited Thailand ke Aceh Utara dan penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, yang berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Utara. Dengan sektor perikanan yang akan digarap dikawasan PPI Kuala Cangkoi antara lain, penangkapan ikan, pengolahan ikan serta industri perikanan lainnya yang memungkinkan untuk dilakukan dan dikembangkan.

#### **D.Penutup**

Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Sejak tahun 1960, kebijakan pemerintah telah mengonversi Thailand dari negara pertanian ke industri. Antara tahun 1985 dan 1995, Thailand memiliki salah satu tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Negara ini terutama didorong oleh pembuatan barang untuk ekspor. Indonesia mengeluarkan kebijakan transshipment dan berdampak terhadap industri pengolahan ikan asal Thailand. Salah satunya adalah Thail Union Group PCL yang merupakan perusahaan pengalengan tuna terbesar dunia yang bemarkas di Thailand. Hal ini terjadi karena sebagian besar bahan baku ikan diambil dari perairan Indonesia yaitu Maluku dan Aru. Pengambilan ini dilakukan menggunakan kapal Thailand yang dibawa oleh masyarakat Indonesia. Selain itu salah satu kota Filipina yang merupakan eksportir tuna terbesar di dunia juga mengalami masalah akibat kebijakan transshipment tersebut yaitu stok yang mengalami penurunan. Kota tersebut yaitu kota di Filipina General Santos. Di Thailand juga mengalami penurunan pasokan bahan baku ikan untuk diolah menjadi ikan tuna kaleng. Hal ini disampaikan oleh Furryanto, Kepala Produksi CV Sari Laut Jaya Unit Pengolahan Ikan (UPI) Muncar, Banyuwangi usai pulang dari Dubai, Uni Emirate Arab. bercerita stok ikan kaleng asal Thailand dan Filipina turun drastis di Dubai. Dengan menurunnya stock ikan kaleng asal Thailand dan Filipinan berdampak harga semakin kompetitif dengan Indonesia yang memiliki sumber perikanan yang banyak. Saat ini menurut Fury harga rata-rata ikan kaleng Thailand dan Filipina di Dubai US\$ 17/karton. Sedangkan ikan kaleng Indonesia kini sudah mulai merangkak naik menjadi US\$ 16,5-16,75/karton. Sampai pada tahun 2014 industri pengolahan ikan di Asia Tenggara dikuasai oleh Thailand dan Filipina. Ekspor ikan olahan dan ikan mentah dari kedua negara tersebut lebih besar dibandingkan negara di Asia Tenggara lainnya. Sementara itu, Indonesia sebagai pemilik lautan terluas dan garis panjang pantai terpanjang di Asia Tenggara hanya menduduki posisi ketiga. Namun, kini situasinya mulai berubah dan menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahwa kekuatan industri perikanan di wilayah Asia Tenggara mulai bergeser ke Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi surplus dalam perdagangan sektor perikanan Indonesia. Pada tahun 2013 nilai ekspor perikanan mencapai USD2,86 miliar, kemudian pada 2014 naik menjadi USD3,1 miliar. Untuk periode Januari sampai September 2015, Indonesia adalah negara yang paling unggul dalam hal ekspor komoditas tuna, tongkol, dan cakalang (TTC). Berdasarkan data UN Comtrade periode Januari-September 2015, impor TTC dari Indonesia naik 267 persen atau 16,1 ribu ton. Kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk KKP, Nilanto Perbowo kepada *Liputan6.com*, nilainya mencapai USD127,4 juta. Sebaliknya, Thailand mengalami penurunan volume sebanyak 13,4 persen menjadi 70,7 ribu ton. Nilai ekspornya turun 13,6 persen menjadi USD313,5 juta. Filipina turun 21,2 persen menjadi 14,4 ribu ton dengan nilai USD79 juta atau turun 21,7 persen. Dampak yang mendalam dirasakan oleh Thailand dikarenakan bukan hanya industri produk olahan dalam negeri yang terkena dampaknya tetapi juga industri asal Jepang yang melakukan investasi di Thailand. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan, beberapa perusahaan pengolahan ikan asal Jepang akan merelokasi pabriknya dari Thailand ke Indonesia. Hal ini dipastikan saat kunjungan Susi Pudjiastuti ke Jepang. Selain itu, pemerintah sedang gencar membuka investasi di sektor hilir perikanan pasca penutupan kesempatan investasi asing di sektor hulu yaitu sektor perikanan tangkap. Selain Investor asal Jepang, dari dalam negara Thailand sendiri juga ikut memiliki ketertarikan untuk merelokasi industrinya ke Indonesia. Salah satu perusahaan Thailand yang ingin beroperasi di Indonesia yaitu Perusahaan Aneka

Tuna di Thailand. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan penelitian ini. Sebenarnya, penelitian ini bisa lebih baik lagi apabila langsung meneliti ke negara Thailand. Penulis juga berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca termasuk penelitian yang selanjutnya bisa saja meneliti dari segi diplomasinya karena penelitian ini melihat dari segi ekonomi politik internasionalnya dimana suatu kebijakan yang dikeluarkan suatu negara bisa saja mempengaruhi perekonomian negara lain baik dampaknya yang bisa saja besar ataupun sebaliknya.

#### Daftar Pustaka

- Anindita, Ratya, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, ANDI, Yogyakarta, 2012.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Modul Konsumsi, Survei Sosial Ekonomi Nasional 1910-2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Baldwin, David A. , *Interdependence and Power: a Conceptual Analysis*, dalam *International Organization*. Vol. 34.4, (Wisconsin : University of Wisconsin, Autumn 1980)
- Burchill, Scott, Andrew Linklater, *Theories Of International Relations, Fourth Edition*, (New York : Palgrave Macmillan)
- Coulombis, A.Theodore dan Wolfe, F.James, "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, keadilan dan Power", Bandung, A.bardin. 2010.
- Dampak kebijakan transshipment dan kelolanya, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/03/24/nasional/daerah/15/06/09/npo58p-dampak-kebijakan-emtransshipmentem-1000-nelayan-sulut-jadi-penganggur>.
- Deliarnov, "Ekonomi politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang komprehensif", Erlangga. Jakarta. 2016.
- Hadi, Hamdy, *Ekonomi Internasional: Teori dan kebijakan keuangan internasional*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Hayenga, L., *Cost Structures of Pork Slaughter and Processing Firms: Behavioral and Performance Implications*. Staff Paper 287. Department of Economics, Iowa State University, 2017.
- Hikmayani, Yayan. 2015. *Efektivitas Pemberlakuan Kebijakan Moratorium Kapal Eks Asing dan Transshipment Terhadap Kinerja Usaha Penangkapan Ikan*. DKI Jakarta: Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Kebijakan Sosek KP* Vol, 5 No. 2 Tahun 2015.
- Isiksal, Hüseyin, *To What Extend Complex Interdependence Theorists Challenge to Structural Realist School of International Relations?* dalam *Alternatives: Turkish Journal of International Relations*, (Turkey : Vol.3, No.2&3 Summer&Fall, 2004).
- Jamil, Ahmad, *Ekonomi Internasional*, Penerbit Media Midya Mandal, Yogyakarta, 2012.
- Keohane, Robert, Joseph Nye, *Chapter I Interdependence in World Politics*, dalam *Power and Interdependence 3rd Edition*, (New York : Longman Publishing, 2001).
- Kholifah, Siti. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo. 2018.
- Parthiana, Iwayan. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Yrama Widya. 2016.
- Larangan transshipment berlaku untuk semua negara, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141202160709-92-15307/menteri-susi-larangan-transshipment-berlaku-di-semua-negara>, pada tanggal 23 Mei 2018.
- Leifer, Michael, *Politik Luar Negeri Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 2015.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Mas'oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta. LP3ES.2010.
- Nugroho, Thomas. *Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Pengaruh transshipment terhadap perekonomian Thailand, diakses dari <http://ekbis.sindonews.com/read/906365/34/thailand-kalahkan-industri-pengalengan-ikan-indonesia-1411995537>.

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor/57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- PH, Victor Nikijuluw. *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*. Jakarta: PT.Pustaka Cidesindo.2008.
- Subroto, *Kebijakan ekonomi di bidang internasional*, ISEI dan Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2015.
- Sunarno, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*: Jakarta. Lembaga Administrasi Negara
- Tambunan, Tulus, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran: Teori dan Temuan Empiris*, LP3ES. Jakarta, 2011.
- Zaj, E.Edward. *Political Economy of Fairness*. (Massachusetts: Massachusetts institute of Technology), 2015.
- "FAO National Aquaculture Sector Overview (NASO)". 2016.Fao.Org. Accessed December 3 2016. [http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso\\_thailand/en#tcN70044](http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_thailand/en#tcN70044).
- "Sold To The Sea": Human Trafficking In Thailand's Fishing Industry/Environmental Justice Foundation (EJF)".2016.Ejfoundation.Org.Accessed.